

OPTIMALISASI PELAKSANAAN BINTER TNI AD UNTUK KALANGAN ATAS

Oleh :

Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si
Dekan FISIP Unjani Cimahi
agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, TNI AD adalah alat pertahanan negara di sektor darat, dimana pemberdayaan wilayah pertahanan darat merupakan sarana dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta guna mentransformasikan segala potensi nasional menjadi sumber daya pertahanan darat. Fungsi pembinaan teritorial TNI AD di arahkan untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang melalui metode Binter, yakni komunikasi sosial (Komsos), pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil), dan bhakti TNI, yang digelar secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut oleh satuan komando teritorial TNI AD (atau disebut pula dengan satuan komando kewilayahan / Satkowil), baik Kodam, Korem, Kodim, sampai dengan Koramil, dengan ujung tombak Babinsa di tingkat desa / kelurahan.

Selama ini, pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Satkowil banyak berfokus pada kalangan menengah ke bawah, dengan target binter adalah lapisan masyarakat, baik ormas, OKP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh adat, dan tokoh sosial lainnya, di akar rumput (grass root). Namun demikian, jarang sekali, bahkan hampir tidak terjadi, target binter TNI AD untuk kalangan atas, kalangan pejabat, kalangan elit politik dan pemerintahan maupun pimpinan eselon di lingkungan Kementerian / Lembaga (K/L) negara. Padahal, elemen kalangan atas ini penting untuk dijadikan target Binter TNI AD karena mereka adalah kalangan pejabat pengambil keputusan, pengambil kebijakan, dan bagian dari kelompok yang membuat aturan perundang-undangan, yang tentunya sangat strategis untuk dijadikan sasaran binter.

Binter TNI AD untuk kalangan atas ini krusial dilakukan karena kalangan atas ini banyak yang belum mengetahui, memahami dan menjiwai apa itu pembinaan territorial?, bagaimana itu pembinaan territorial? Dan mengapa pembinaan territorial dilakukan?, termasuk manfaat dan arti penting Binter TNI AD dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun dalam menunjang pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Kalangan atas di lingkungan kementerian dan lembaga negara perlu memahami pembinaan territorial karena banyak kebijakan pemerintah yang seringkali bertentangan antara satu dengan yang lainnya, adanya perasaan “super hero” pada lembaga pemerintahan tertentu, serta adanya ego sektoral antar kementerian dan lembaga yang membuat implementasi kebijakan pemerintah direspon negative oleh kalangan masyarakat bawah.

Dalam kenyataannya, terdapat fenomena / masalah dimana pada level pusat, Binter TNI AD kurang mendapatkan prioritas oleh berbagai pihak, sehingga jarang sekali ada forum komunikasi antar eselon I atau eselon II di lingkungan kementerian / lembaga negara bersama dengan jajaran eselon I dan II di lingkungan TNI/TNI AD. Kegiatan bersama antara jajaran pimpinan TNI / TNI AD dengan jajaran pimpinan di lingkungan kementerian dan lembaga negara juga jarang digelar, misalnya kegiatan “coffe morning” bersama maupun “olahraga” bersama. Padahal, pada level daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah sangat intensif dilakukan, baik dalam berbagai forum koordinasi maupun kegiatan bersama antar pimpinan daerah dan jajarannya, yang melibatkan unsur TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks ini, serangkaian kegiatan Binter TNI AD di daerah telah berjalan dengan baik, khususnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder, namun di tingkat pusat, khususnya kementerian dan lembaga negara, masih belum nampak berjalan secara optimal. Komunikasi dan koordinasi antar Panglima TNI dan KSAD dengan para menteri dan kepala lembaga negara sudah berjalan dengan baik, namun belum dijabarkan melalui forum atau kegiatan bersama antara pejabat di bawahnya baik di tingkat eselon I maupun eselon II. Padahal, pejabat eselon I dan II di lingkungan TNI/TNI AD dan kementerian / lembaga negara ini merupakan pelaksana teknis yang sangat penting untuk selalu melakukan interaksi, komunikasi, dan koordinasi teknis operasional untuk membahas berbagai kebijakan, keputusan,

maupun setiap persoalan di tengah masyarakat akibat dari kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah, kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya, seperti contoh kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga gas, kenaikan BBM, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Dalam kaitan inilah akan dilakukan kajian tentang : “Optimalisasi Pembinaan Teritorial TNI AD Untuk Kalangan Atas”.

BAB II

PEMBAHASAN

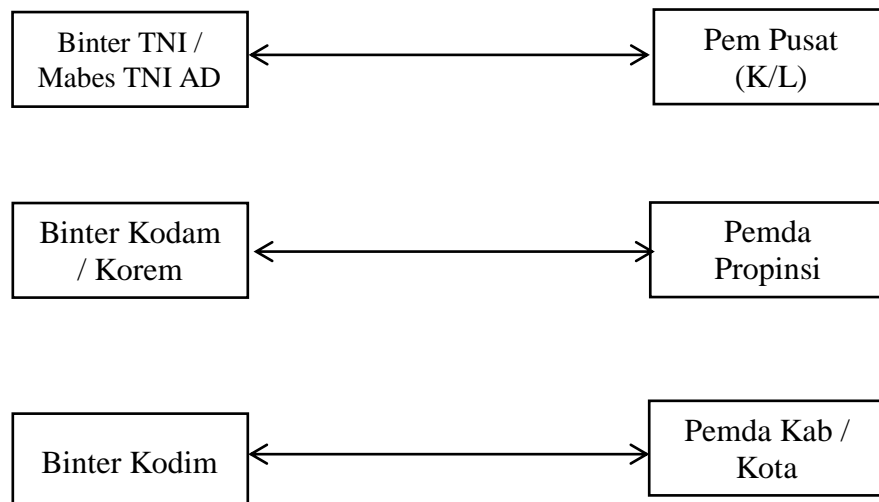
1. Kedudukan Binter TNI AD

Binter TNI AD merupakan salah satu fungsi TNI AD yang dijalankan secara berjenjang / bertingkat oleh semua jajaran satuan TNI AD, baik dari level pusat sampai dengan daerah, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, dimana setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi, khususnya yang mengancam keutuhan NKRI, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat jalannya pembangunan nasional, dapat dideteksi secara dini, dicegah secara dini, dan ditangkal secara dini oleh semua jajaran satkowl TNI AD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Binter TNI AD selama ini sangat berperan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, dan menopang kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan oleh melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, maupun bhakti TNI, yang sangat dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. Berbagai permasalahan masyarakat di tingkat akar rumput dapat diselesaikan melalui sinergi antara Binter TNI AD dengan semua pemangku kepentingan (stake holders) terkait, khususnya pemerintah daerah, sehingga keberadaan Binter TNI AD terasa manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat.

Kedudukan Binter TNI AD tergelar dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah yang sinergis dengan semua jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pada level pusat, kedudukan Binter TNI/TNI AD dijalankan oleh Mabes TNI / Mabes TNI AD yang memiliki mitra / partner Pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga) dan jajarannya. Pada level daerah propinsi, Binter TNI AD dijalankan oleh satuan Kodam / Korem yang bermitra / partner dengan pemerintah propinsi dan jajarannya. Pada level daerah kabupaten / kota, Binter TNI AD digelar oleh satuan Kodim yang bermitra / partner dengan pemerintah kabupaten / kota dan jajarannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 1 berikut ini.

Bagan 1. Kedudukan Pembinaan Teritorial



2. Binter Level Pusat

Pada level pusat, Binter TNI AD sangat penting dengan menjadikan sasaran adalah kementerian / lembaga pemerintah setingkat kementerian karena mereka ini adalah para pejabat strategis, pengambil kebijakan, dan penentu kebijakan, khususnya para pejabat eselon I dan II di setiap kementerian dan lembaga pemerintahan. Banyak sekali kebijakan maupun keputusan dari pemerintah pusat, khususnya kebijakan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, memancing reaksi negative di kalangan akar rumput, dan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat bawah,

sehingga perlu dilakukan Binter yang mengarah pada kalangan atas ini agar supaya lebih hati-hati dalam membuat kebijakan, lebih cermat dalam menyusun keputusan dan lebih cerdas dalam merespon setiap persoalan.

Selama ini, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan BBM, kenaikan gas, kenaikan tariff dasar listrik, maupun persoalan kelangkaan sembako di pasaran yang membuat masyarakat tidak puas, kecewa dan memancing unjuk rasa mahasiswa, masih disikapi secara emosional oleh jajaran kementerian / lembaga pemerintah, masih menunjukkan ego sektoral antar kementerian, dan masih paling merasa “sok jago”, “paling hebat”, maupun “super hero” yang pada akhirnya malah kontra produktif dan menjadi “bulan-bulanan” di tengah masyarakat maupun di dunia maya (media sosial).

Dalam konteks inilah, Binter TNI AD, khususnya di level Pusat harus menasar pada pejabat pemerintahan, pejabat kementerian, jajaran lembaga pemerintahan dan pihak terkait lainnya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka terwujudnya sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam pemerintah pusat, baik kementerian, lembaga, maupun instansi sejenisnya.

Tabel 1. Binter Level Pusat

NO	UNSUR	BINTER TNI / TNI AD	PEMERINTAH PUSAT (K / L)
1	Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Perpang TNI • Perkasad • Bujuk 	<ul style="list-style-type: none"> • PP (Peraturan Pemerintah) • Perpres (Peraturan Presiden) • Permen (Peraturan Menteri)
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara • UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Kementerian Negara • UU Lembaga Negara
3	Aktor Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Panglima TNI • Kasad 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Koordinator • Menteri Teknis • Kepala Lembaga Negara
4	Leading Sectors	<ul style="list-style-type: none"> • Aster Panglima TNI • Aster Kasad 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekjen K/L • Dirjen K/L

3. Binter Level Propinsi

Pada level propinsi, Binter TNI AD dijalankan oleh satuan Kodam / Korem yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia, meskipun belum semua wilayah propinsi terdapat satuan kodam, namun ada satuan korem yang melengkapinya bermitra dengan pemerintah daerah propinsi. Pada level propinsi, Binter Kodam / Korem sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat banyak persoalan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Kodam / Korem dalam menjalankan Binter TNI AD, namun secara umum sudah baik, dimana terdapat sinergi baik komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Kodam / Korem dengan pemerintah daerah dan stake holder terkait lainnya di wilayah propinsi.

Hal ini tentunya sangat ironis, dimana Binter TNI AD pada level propinsi sudah berjalan dengan baik, namun di tingkat pusat belum Nampak secara signifikan. Di level propinsi, sudah nyata terwujud forum koordinasi maupun kegiatan bersama antara jajaran Kodam / Korem dengan jajaran pemerintah daerah propinsi, baik gubernur, kepala dinas, kepala badan, dan semua eselon I dan II di pemerintah propinsi dengan semua jajaran Kodam / Korem, baik Pangdam / Danrem, Aster Kodam, Kasiter Korem dan jajaran dibawahnya.

Tabel 2. Binter Level Propinsi

NO	UNSUR	BINTER KODAM/KOREM	PEMDA PROPINSI
1	Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Skep Pangdam • Skep Danrem • Bujuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Propinsi • Pergub
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara • UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pemerintahan Daerah
3	Aktor Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Pangdam • Danrem 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur / Wakil Gubernur • Ketua DPRD Propinsi
4	Leading Sectors	<ul style="list-style-type: none"> • Aster Kodam • Kasiter Korem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan OPD Propinsi • Kepala Dinas, Kepala Badan, dll

4. Binter Level Kabupaten / Kota

Pada level kabupaten / kota, Binter TNI AD digelar oleh Kodim bersama satuan territorial di bawahnya, seperti Koramil (Kecamatan) dan Babinsa (Desa / Kelurahan) secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga sudah banyak memberikan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat bawah, melalui berbagai kegiatan pembinaan geografi, pembinaan demografi, serta pembinaan kondisi sosial, melalui metode komunikasi sosial, bintahwil, dan bhakti TNI.

Hal ini sebenarnya menjadi ironis ketika Binter Kodim di level kabupaten / kota berjalan secara baik dan sinergis, namun pada level pusat belum sinergis dan belum kolaboratif, yang tentunya menjadi fenomena / persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, baik sebab dan akibatnya. Diharapkan Binter TNI AD di level pusat dapat berjalan sebagaimana Binter di level daerah, khususnya Kodam, Korem, dan Kodim.

Tabel 3. Binter Level Kab / Kota

NO	UNSUR	BINTER KODIM	PEMDA KAB/KOTA
1	Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Skep Dandim • Bujuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Kab / Kota • Perbup / Perwalkot
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara • UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pemerintahan Daerah
3	Aktor Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Dandim 	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati / Wakil Bupati • Walikota / Wakil Walikota • Ketua DPRD Kab / Kota
4	Leading Sectors	<ul style="list-style-type: none"> • Aster Kodam • Kasiter Korem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan OPD Kab / Kota • Kepala Dinas, Kepala Badan, dll

5. Forum Komsos Dalam Binter TNI AD

Salah satu metode Binter TNI AD adalah komunikasi sosial (Komsos) yang digelar oleh semua satuan komando kewilayahan TNI AD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komunikasi sosial digelar oleh Satkowil melalui pembentukan dan pemanfaatan berbagai forum komunikasi maupun forum koordinasi yang ada di pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah. Di level daerah, baik propinsi, kabupaten / kota, terdapat banyak sekali forum yang dimanfaatkan oleh Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil untuk melakukan berbagai upaya pendekatan, persuasi, sosialisasi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Di level daerah, banyak sekali forum, seperti forum Forkopimda, Kominda, FKUB, FKDM, FKPT dan banyak lagi forum lainnya yang diikuti oleh jajaran sampai tingkat koramil dan bahkan babinsa, dalam rangka mendeteksi setiap persoalan, menangkal ancaman, dan mencegah aksi yang membahayakan keutuhan NKRI. Forum-forum ini ada di tingkat daerah, namun ironisnya tidak ada di tingkat pusat, sehingga muncul sikap ego sektoral dan mis persepsi antar kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menyikapi setiap persoalan bangsa dan negara. Sudah saatnya, di level pusat, dibentuk berbagai forum seperti di level daerah ini.

Tabel 4. Forum Komsos Dalam Binter TNI AD

NO	NAMA FORUM	PEM PUSAT	PEM PROPINSI	PEM KAB / KOTA
1	Forum Intelijen	Kominpus (Komunitas Intelijen Pusat)	Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) Propinsi	Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) Kab/Kota
2	Forum Koordinasi Pimpinan	Tidak Ada	Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Propinsi	Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kab/Kota
3	Forum Kerukunan Beragama	Tidak Ada	FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Propinsi	FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kab/Kota
4	Forum Kewaspadaan Dini	Tidak Ada	FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Propinsi	FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kab/Kota
5	Forum Pencegahan Perorisme	Tidak Ada	FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Propinsi	FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Propinsi

6. Kegiatan Bersama Dalam Binter TNI AD

Dalam menggelar Binter TNI AD, diperlukan berbagai sarana yang dapat mendukung keberhasilan semua program dan kegiatan Binter TNI AD. Di level daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, sering kali Pangdam, Danrem, Dandim dan jajaran dibawahnya, khususnya pengembalian fungsi territorial melakukan kegiatan bersama seperti olahraga bersama maupun coffee morning dengan instansi samping / instansi mitra / partner, yakni jajaran pemerintah daerah, DPRD, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan semua pihak terkait lainnya, dimana terjalin ikatan emosional, ikatan silaturahmi dan rasa persaudaraan antar instansi yang ada di daerah, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan setiap persoalan di daerah.

Namun demikian, di level pusat, kegiatan bersama ini seperti belum terlihat secara maksimal, dimana jarang sekali digelar kegiatan bersama berupa olahraga bersama maupun coffee morning bersama antar TNI / TNI AD dengan semua jajaran kementerian / lembaga negara dan pihak terkait lainnya di pemerintahan pusat. Kalaupun ada kegiatan, paling banter, hanya komunikasi atau saling kunjung secara incidental antara Panglima TNI / KSAD dengan Menteri atau Kepala lembaga setingkat kementerian, yang jarang sekali berlanjut ke jajaran dibawahnya, khususnya pada eselon 1 maupun eselon II.

Memang telah ada dilakukan rapat cabinet yang dipimpin oleh Presiden dan Rakor yang digelar oleh para menteri coordinator masing-masing, namun hal itu sifatnya masih bersifat formal dan belum diikuti oleh para pejabat dibawahnya. Akibatnya, sering terjadi mis komunikasi dan mis persepsi antar kementerian dan lembaga negara dalam menyikapi setiap persoalan yang “viral” di tengah masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat / public menilai bahwa tidak ada kesamaan persepsi dan penyatuan pandangan antar pejabat dalam setiap persoalan yang muncul. Masing-masing kementerian / lembaga negara mementingkan instansi masing-masing dan cenderung ego kelembagaan yang pada akhirnya merusak citra pemerintahan di depan publik.

Sudah saatnya binter level pusat menjadikan kalangan atas menjadi target dan sasaran untuk digandeng dan diajak dalam berbagai kegiatan bersama seperti olahraga bersama dan coffee morning bersama secara bergiliran tempatnya baik di lingkungan TNI / TNI AD maupun di lingkungan kementerian / lembaga negara, yang melibatkan pejabat eselon I dan II, agar terwujud hubungan yang saling mengenal, saling silaturahmi, saling anjangsana, dan saling sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang digelar di level daerah (propinsi, kabupaten / kota).

BAB III

PENUTUP

7. Kesimpulan

- a. Binter TNI AD selama ini lebih difokuskan pada kalangan menengah ke bawah, khususnya pada ormas, OKP, LSM, maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, melalui metode komunikasi sosial, bintahwil dan bhakti TNI. Untuk Binter TNI AD bagi kalangan atas belum tersentuh dan bahkan mungkin belum terpikirkan sehingga belum ada juklak / juknis / jukmin tentang Binter TNI AD untuk kalangan atas.
- b. Binter TNI AD yang digelar di level daerah, baik Kodam, Korem, Kodim, dan koramil telah tergelar dengan baik, dengan memanfaatkan berbagai forum komunikasi dan forum koordinasi yang ada di daerah, termasuk menggelar kegiatan bersama, seperti olahraga bersama maupun coffee morning bersama antar pemangku kepentingan. Hal ini semacam ini belum nampak digelar pada level pusat, sehingga antar pemangku kepentingan di level pemerintah pusat belum banyak saling mengenal dan belum sinergis.

8. **Saran**

- a. Dimohonkan kepada KSAD untuk mengusulkan kepada Panglima TNI Up Aster Panglima TNI agar membentuk forum komunikasi dan forum koordinasi serta kegiatan bersama antara TNI / TNI AD dengan jajaran kementerian dan lembaga pemerintah setingkat kementerian sebagai “jalan masuk” / “sarana” bagi TNI / TNI AD untuk menggelar Binter TNI AD bagi kalangan atas, khususnya para pejabat eselon I dan II di lingkungan K/L untuk “mengkomunikasikan” berbagai program dan kegiatan Binter TNI AD.

- b. Dimohonkan kepada Danpusterad agar ide / pemikiran dalam naskah kajian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian / kajian yang lebih detail / terperinci oleh satuan / unit kerja / direktorat di Pusterad dengan dukungan anggaran yang ada serta sehingga akan terpetakan persoalan, permasalahan, solusi, dan model yang komprehensif tentang “Binter TNI AD bagi kalangan atas”.